

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dengan arah pengaruh positif. Artinya semakin tinggi alokasi belanja fungsi pendidikan, maka kemiskinan juga semakin tinggi. Hal tersebut dikarenakan serapan proporsi belanja fungsi pendidikan tidak sama setiap wilayah serta belum terfokus pada peningkatan kualitas pendidikan.
2. Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, meskipun dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi belanja fungsi kesehatan maka kemiskinan akan turun. Meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan produktivitas kerja seseorang yang berdampak pada kualitas serta kemampuan fisik seseorang dalam bekerja untuk meningkatkan penghasilan agar terbebas dari kemiskinan.
3. Belanja Fungsi Perlindungan Sosial berpengaruh terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, meskipun dengan arah pengaruh negatif. Artinya semakin tinggi belanja fungsi perlindungan sosial maka kemiskinan akan turun. Melalui pendanaan untuk program perlindungan sosial, masyarakat

menjadi terjamin dalam akses terhadap pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan apakah alokasi belanja pemerintah untuk fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tepat sasaran sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen yang lebih dapat mempengaruhi kemiskinan seperti jumlah penduduk, tingkat pengangguran, PDRB, dan lain sebagainya, agar hasil penelitian yang diperoleh lebih beragam.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian hanya terfokus di wilayah Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil penelitian tidak dapat disamakan dengan wilayah Provinsi lain, khususnya di Pulau Jawa.
2. Data penelitian hanya dalam kurun waktu lima tahun dari 2017-2021, sehingga kurang memperhitungkan perubahan yang terjadi di masa lampau

dan di masa mendatang yang mungkin dapat mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian ini.

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas, sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

5.4 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka implikasi penelitian ini adalah:

1. Implikasi Teoritis
 - a) Belanja fungsi pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan arah pengaruh positif. Hasil ini tidak sesuai dengan teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, dimana pengeluaran atau belanja pemerintah digunakan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah mengentaskan atau menurunkan angka kemiskinan.
 - b) Belanja fungsi kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan, meskipun dengan arah pengaruh negatif. Melalui alokasi belanja fungsi kesehatan yang besar, pemerintah daerah mempunyai kebijakan fiskal yang memadai dalam menjalankan program-program untuk meningkatkan derajat kesehatan seperti pengobatan gratis, meningkatkan kualitas gizi, program ibu dan anak.

c) Belanja fungsi perlindungan sosial berpengaruh terhadap kemiskinan, meskipun dengan arah pengaruh negatif. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya untuk menciptakan pelayanan perlindungan sosial bagi semua masyarakat terutama masyarakat miskin. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi belanja perlindungan sosial telah disalurkan dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah dalam mengalokasikan besaran belanja pemerintah agar sesuai prioritas dan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.